



**LAPORAN EVALUASI TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Pada bulan September tahun 2015, Sidang Umum PBB menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi agenda global 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di berbagai level pemerintahan, mulai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Untuk itu perumusan untuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tingkat Provinsi bersama Pemerintah Kab/ Kota dengan melibatkan unsur terkait, mulai dari Akademisi, Media, Pelaku Usaha, LSM, Filantropi hingga kaum millenials. Berbagai rencana tersebut akan mencakup tujuan, target dan indikator, serta program dan kegiatan.

Sulawesi Selatan dalam peranannya dalam Pembangunan Berkelanjutan diharapkan memberikan impact yang nyata, sejumlah kebijakan yang telah kami tempuh utamanya pada bidang kesehatan melalui program pengembangan Rumah Sakit Regional diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga di Sulawi Selatan, kemudian Program ARSINUM (Air Siap Minum) di Daerah Pesisir dan Kepulauan yaitu pengadaan Alat filtrasi air laut menjadi air yang siap digunakan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun rumah tangga. Melalui program tersebut menjadi isyarat bahwa Pemerintah harus hadir dan memahami dengan serius, bahwa untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan daerah dan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia adalah menjadi yang utama mengingat di masa pandemi saat ini. Sumberdaya Manusia Indonesia yang berkualitas akan menempatkan Sulawesi Selatan semakin diperhitungkan dan mampu berkompetisi dalam percaturan skala regional dan global. Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas ini tentu akan menjadikan petarung yang siap masuk dalam pasar kerja yang semakin mengglobal.

Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan ini memuat berbagai pencapaian target TPB/SDGs yang berhasil ditorehkan pemerintah bersama dengan seluruh aktor nonpemerintah, khususnya yang berada di dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam percepatan pencapaian target TPB dimasa pandemi Covid-19, mulai dari Kemiskinan, Kesehatan,





Pendidikan serta pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan itu, untuk memastikan bahwa target-target yang telah dan akan ditetapkan secara nasional dapat diimplementasikan di daerah dengan tingkat deviasi sekecil mungkin, maka perencanaan program/kegiatan harus disusun secara sistematis dan berkualitas. Untuk itu melalui dokumen ini diharapkan menjadi pertimbangan evaluasi untuk suatu rumusan yang lebih efektif dalam upaya penyelarasan antara target-target nasional dan target-target daerah, dimana kita sadari bahwa target nasional hanya bisa dicapai melalui kontribusi daerah. Sebaliknya target-target daerah tentulah tidak dapat dicapai oleh Daerah sendiri tanpa adanya bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Laporan ini memuat hasil evaluasi atas pencapaian target dari 193 indikator TPB/SDGs serta pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian target tersebut, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun nonpemerintah. Evaluasi ini didasarkan pada target pencapaian indikator serta kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan





DAFTAR ISI

I.	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Metodologi Penyusunan Laporan	4
1.3. Sistematika Pelaporan	5
II.	6
RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	6
2.1. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	7
2.2. Ringkasan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.....	8
III	13
Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs	13
3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	14
3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	17
3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	20
3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.	25
3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	28
3.6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua	31
3.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua ...	33
3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	35
3.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.....	38
3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	41
3.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	44
3.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	47
3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	49
3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.....	51
3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	53
3.16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	57
3.17. Memperkuat Saran Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	59





IV 61

PRAKTIK-PRAKTIK BAIK..... 61

 4.1. Praktik Baik Pilar Sosial 62

 4.2. Praktik Baik Pilar Ekonomi 63

 4.3. Praktik Baik Pilar Lingkungan 64

 4.4. Praktik Baik Pilar Kelembagaan..... 65

V. KESIMPULAN..... 67

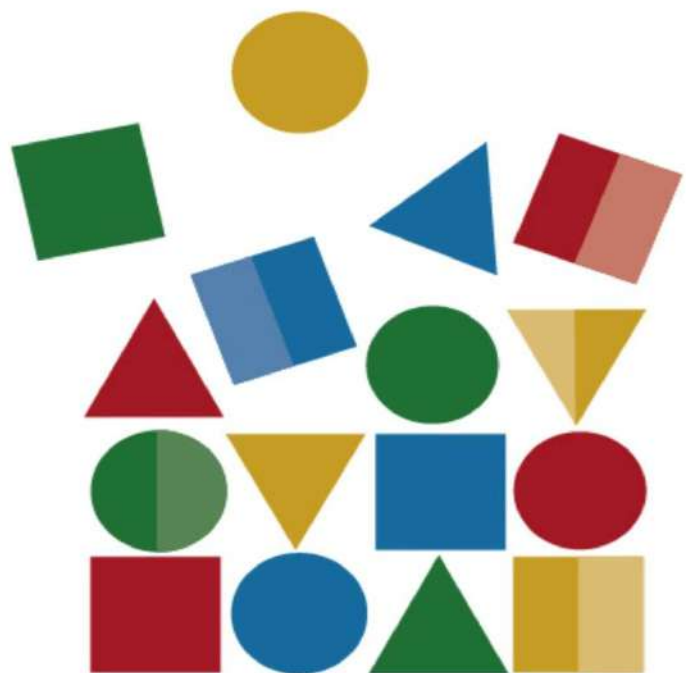
..... 67





I.

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 pada Tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs semua tingkatan: Nasional dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), bahkan sampai ditingkat Masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau *Sustainable Development Goals* TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





Gambar 1.1.

Prinsip-prinsip Kolaborasi Untuk Pelaksanaan TPB/SDGs
Tahun 2020

PRINSIP - PRINSIP KOLABORASI UNTUK PELAKSANAAN TPB/SDGs DI INDONESIA



Pelaksanaan TPB/SDGs adalah komitmen semua pihak, tidak hanya kewajiban pemerintah, namun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya (Akademisi & Pakar; Filantropi & Bisnis ; Organisasi Masyarakat Sipil serta Media). Pemerintah setempat hanya akan berhasil dalam melaksanakan agenda besar ini jika adanya partisipasi luas yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan seperti anggota parlemen, pemimpin daerah, masyarakat lokal, masyarakat sipil, pemuda, komunitas agama, serikat buruh, pelaku bisnis dan akademis di seluruh dunia, bahwa jika Global Goals untuk pembangunan Berkelanjutan ini diketahui oleh orang dengan baik dan membuat orang peduli mengenai apa yang telah dijanjikan, para politisi tentunya akan berada dibawah tekanan yang lebih besar untuk merealisasikannya.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam percepatan pencapaian target TPB dimasa pandemi covid-19, mulai dari Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan serta pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menyebabkan perubahan pada seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2020 yang berfokus pada upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator TPB/SDGs yang berdampak yaitu: Pertumbuhan





Ekonomi -0,70, Tingkat Kemiskinan 8.70 % (Maret) dan Tingkat Pengangguran Terbuka 6,31

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai langkah strategis dengan pada sasaran pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, khususnya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemic Covid-19, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan inovasi. Pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan diarahkan untuk meningkatkan produktifitas komoditas unggulan sebagai upaya mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekspor dengan indicator pembangunan.

Sulawesi Selatan dalam peranannya dalam Pembangunan Berkelanjutan diharapkan memberikan impact yang nyata, sejumlah kebijakan yang telah di tempuh utamanya pada bidang kesehatan melalui program pembangunan Rumah Sakit Regional di enam lokasi yang direncanakan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga di Sulawesi Selatan, kemudian Program Pelayanan Kesehatan Brigade Siaga Bencana (BSB) yang merupakan langkah antisipasi ketika terjadi darurat bencana dan juga diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan yang bersifat darurat. Dengan Program yang memihak pada dunia kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahwa untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan daerah dan masyarakat, maka kualitas sumber daya manusia adalah menjadi tumpuan utama.

1.2. Metodologi Penyusunan Laporan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Mekanisme penyusunan laporan tersebut mengacu kepada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang telah dirilis oleh Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas pada Agustus 2019. Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah dan nonpemerintah menjadi bagian penting





dalam penyusunan laporan ini, khususnya untuk membahas pencapaian target atas setiap indikator TPB/ SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Hasil dari penyusunan laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional. Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

1.3. Sistematika Pelaporan

Laporan ini terdiri atas 5 (lima) bagian, sebagai berikut: Bab pertama tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan serta gambaran awal terkait progres pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs, metodologi penyusunan laporan, serta sistematika laporan.

Bab kedua tentang ringkasan status pencapaian TPB/ SDGs, memberikan gambaran ringkas mengenai status pencapaian untuk indikator yang terdapat pada masing-masing tujuan di dalam TPB/SDGs.

Bab ketiga tentang tinjauan status dan upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs, menjelaskan tentang kecenderungan dan tren atas pencapaian target pada setiap tujuan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan dan pembelajaran, kebijakan dan strategi, serta upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian target TPB/SDGs.

Bab keempat tentang praktik-praktik baik, memberikan ulasan singkat tentang pengalaman implementasi kebijakan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah dalam rangka pencapaian TPB/ SDGs.





II. RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN





2.1. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Di tahun kelima perjalanan SDGs, hampir seluruh negara di dunia menghadapi tantangan yang sama, pandemi COVID-19. Begitu juga di Indonesia, sejak Maret lalu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk menangani pandemi COVID-19. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai episentrum Indonesia Timur tentu menghadapi tantangan yang tak mudah, terutama dalam pencapaian SDGs.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai program dan kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis dalam kondisi Pandemi Covid. Sejumlah langkah yang telah ditempuh daerah sampai dengan akhir tahun 2020 antara lain: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah secara *online*, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB/SDGs, (iv) membuat peraturan tentang penanggungjawab kelompok kerja berupa SK. Gubernur terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Sulawesi Selatan.

TPB/SDGs merupakan komitmen Internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan Nasional dan Daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan yakni Pencapaian Target, Kesesuaian, serta keselarasan TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD. Target-target TPB/SDGs sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam bent uk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Begitupun dengan Isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang





dalam RPJMD 2018-2023. Adapun poin-poin TPB yang sejalan dengan isu strategis Pembangunan daerah, yaitu:

MISI 1:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang
2. Berorientasi Melayani dan Inovatif
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar

MISI 2:

1. Mewujudkan Infrastruktur yang
2. Berkualitas dan Aksesibel
3. Meningkatnya kapasitas dan
4. kualitas infrastruktur wilayah.

MISI 3:

1. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan
2. Ekonomi Baru yang Produktif

MISI 4:

1. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
2. Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat;
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan;
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

MISI 5:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing
2. Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam;
4. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2.2. Ringkasan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Kinerja pelaksanaan TPB/SDGs diindikasikan dengan pencapaian atas target pada masing-masing indikator di dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) kategori, yakni: mencapai target (berlabel HIJAU), akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya

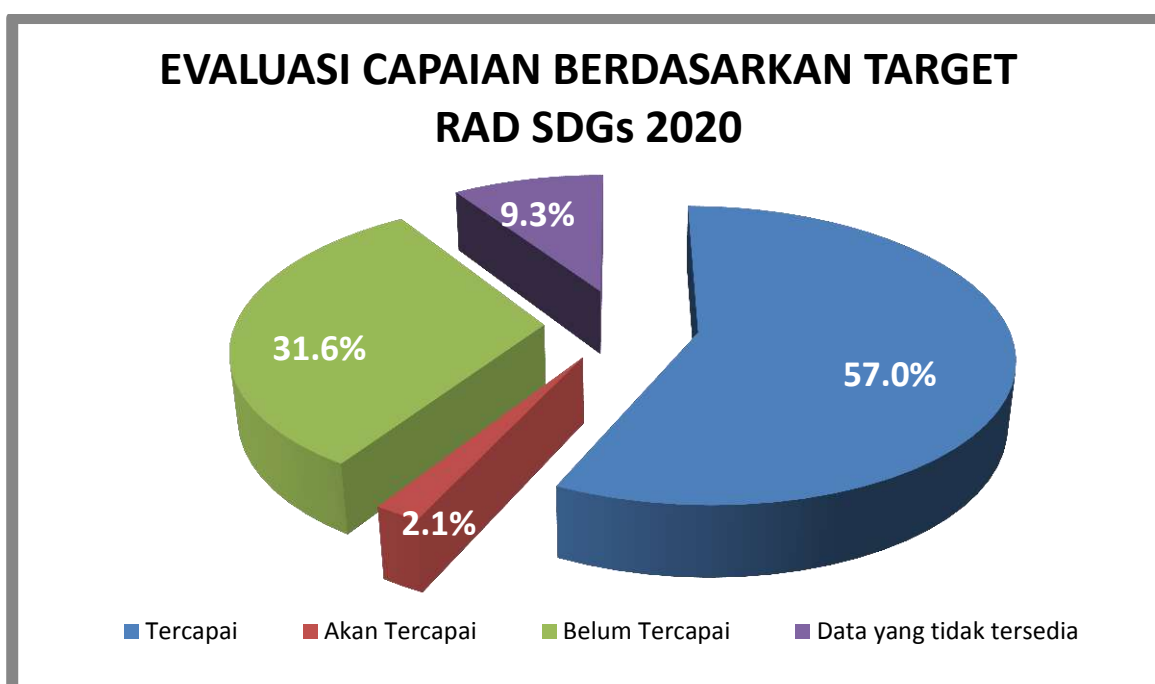




(berlabel BIRU), serta memerlukan perhatian khusus karena disamping belum mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya (berlabel MERAH). Provinsi Sulawesi Selatan menentukan target sebanyak 193 Indikator yang termuat didalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 dengan Evaluasi Capaian Berdasarkan Target RAD SDGs Tahun 2020 yaitu 110 Indikator (57%) telah tercapai target, 61 Indikator (31.6%) belum tercapai target, 4 Indikator (2.1%) capaian yang membaik, dan 18 Indikator (9.3%) yang datanya tidak tersedia.

Gambar 2.1.

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2021)

Pilar Pembangunan Sosial dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 83 indikator yang di dalamnya tercatat sebanyak 50 indikator (25,9%) telah mencapai target. Sebanyak 1 indikator (0,5%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 26 indikator (13,5%)

Pilar Pembangunan Ekonomi dengan 5 tujuan mencakup sebanyak 47 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 29 indikator (15,0%) telah mencapai target.





Sebanyak 2 indikator (1,0%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 15 indikator (7,8%).

Pilar Pembangunan Lingkungan dengan 6 tujuan mencakup sebanyak 48 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 28 indikator (14,5%) telah mencapai target. Sebanyak 15 indikator (10,4%) tercatat akan mencapai target/membaik dibandingkan pencapaian pada periode sebelumnya. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 1 indikator (11,9%).

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan 1 tujuan mencakup sebanyak 15 indikator. Pada pilar tersebut, tercatat sebanyak 3 indikator (1,6%) telah mencapai target. Indikator yang masih memerlukan perhatian khusus karena pencapaiannya baik saat ini maupun periode sebelumnya masih di bawah target dan tercatat sebanyak 5 indikator (2,6%).

Tabel 2.1.

Kinerja Pencapaian TPB/SDGs Berdasarkan 4 Pilar Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai	%	Belum Tercapai	%	Akan Tercapai	%	Data Tidak Tersedia	%
Pilar sosial	83	50	25.9%	26	13.5 %	1	0.5%	6	3.1%
Pilar Ekonomi	47	29	15.0%	15	7.8%	2	1.0%	1	0.5%
Pilar Lingkungan	48	28	14.5%	15	7.8%	1	0.5%	4	2.1%
Pilar Kelembagaan	15	3	1.6%	5	2.6%	0	0.0%	7	3.6%
	193	110		61		4		18	

Sumber: Data diolah, 2021

Kondisi pencapaian pada indikator TPB/SDGs pada tahun 2020 tidak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sebagai respon atas penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Namun demikian, kebijakan PSBB ketat dan





PSBB transisi tersebut tentunya memiliki dampak terhadap pencapaian seluruh pilar pembangunan TPB/SDGs

Ringkasan Pilar Sosial

Pada tujuan 1 tanpa kemiskinan, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi dari sebesar 8,56% pada September 2019 meningkat menjadi 8,72% pada September 2020. Pada tujuan 2 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita tercatat memburuk dari 15,3% (2019) meningkat menjadi 20,3% (2020). Pada tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 96,15 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 73,82 persen pada tahun 2020. Pada tujuan 4 pendidikan berkualitas, rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 8,86 tahun pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,73 tahun. Pada tujuan 5 kesetaraan gender, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100%.

Ringkasan Pilar Ekonomi

Pada Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, bauran energi baru terbarukan tercatat dalam tren positif dari 14,73% pada tahun 2019 meningkat menjadi 20,74% pada tahun 2020. Pada Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan berupa terkontraksinya pertumbuhan ekonomi sebesar -1,55% pada tahun 2020. Pada Tujuan 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, juga menghadapi tekanan akibat pandemi tercermin dari pertumbuhan negatif sektor industri manufaktur sebesar -4,42% pada tahun 2020. Pada Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan, capiana gini ratio dari 0,391 per September 2019 menjadi 0,382 per September 2020. Pada Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan terwujud dengan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik yang meningkat dari 39,09 persen pada tahun 2019 menjadi 43,98 persen pada tahun 2020.





Ringkasan Pilar Lingkungan

Pada Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada tahun 2020 mencapai 88,71% meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 85,34%. Pada Tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan mengalami peningkatan persentase pengguna moda transportasi umum dari 23,30% (2019) menjadi 66,45% (2020). Pada Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menunjukkan penurunan terlihat dari jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dari 45,44 ton/hari (2019) menjadi 19,97 ton/hari (2020). Pada Tujuan 13 penanganan perubahan iklim dilakukan dengan pelaksanaan aksi yang termuat dalam 1 dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tujuan 14 ekosistem lautan, Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2020 mencapai 87,48 melebihi target tahun 2020 sebesar 86,88 persen. Pada Tujuan 15 ekosistem daratan Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada tahun 2020 menjadi 12.000 Ha sesuai dengan target tahun 2020 yaitu 12.000 Ha.

Ringkasan Pilar Kelembagaan

Pada Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat menunjukkan pencapaian seperti Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran sebesar 87,87%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 86,18%.





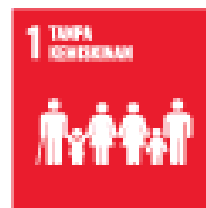
III

Tinjauan Status Pencapaian TPB/SDGs





TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN



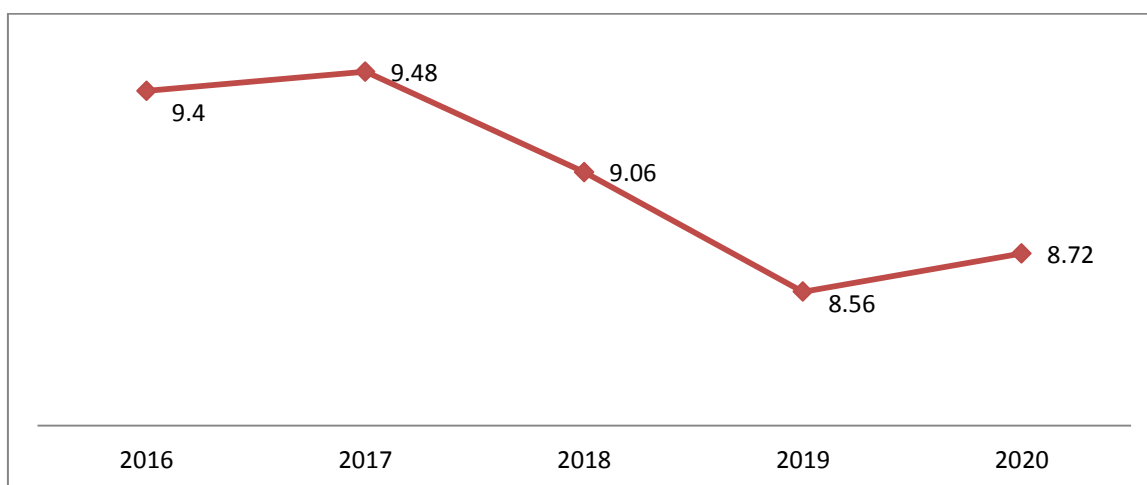
3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk di atas garis kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di atas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan sekalipun relatif menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.

Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Grafik 1.1 Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Sulawesi Selatan, 2017-2020 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021





Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yaitu 8,99 persen dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 8,56. Namun tingkat kemiskinan Sulawesi selatan selama tahun 2016-2020 lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen. Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 12,19 persen pada tahun 2019 telah tercapai

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 825,97 ribu jiwa (4,76%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Septembert 2020) jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 800,24 ribu jiwa (8,99%). Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (776,83 ribu jiwa), terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 23,41 ribu jiwa

Grafik 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2020



Secara nasional, jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan berkontribusi 2,90 persen terhadap total jumlah penduduk miskin nasional. Salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan ialah dampak dari Pandemi COVID-19 seperti terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga bertambahnya masyarakat yang rentan miskin jatuh dalam garis kemiskinan.





Arah Kebijakan

Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) TPB/SDGs, telah membuat Arah Kebijakan yang mendukung tujuan ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan ORSOS/LSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan dalam mendayagunaan sumber kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya;
4. Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin;
5. Penguatan Pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dalam Pembrian bantuan.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari tujuan ini adalah :

1. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun belum optimal.
2. Masih minimnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
3. Minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
4. Terbatasnya SDM pengelola dan pendampingan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) yang belum optimal
5. Belum optimalnya penanganan dan pemberian bantuan sosial pada korban bencana alam
6. Belum optimalnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia.
7. Minimnya tempat-tempat sosial/penampungan bagi usia lanjut.





TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN



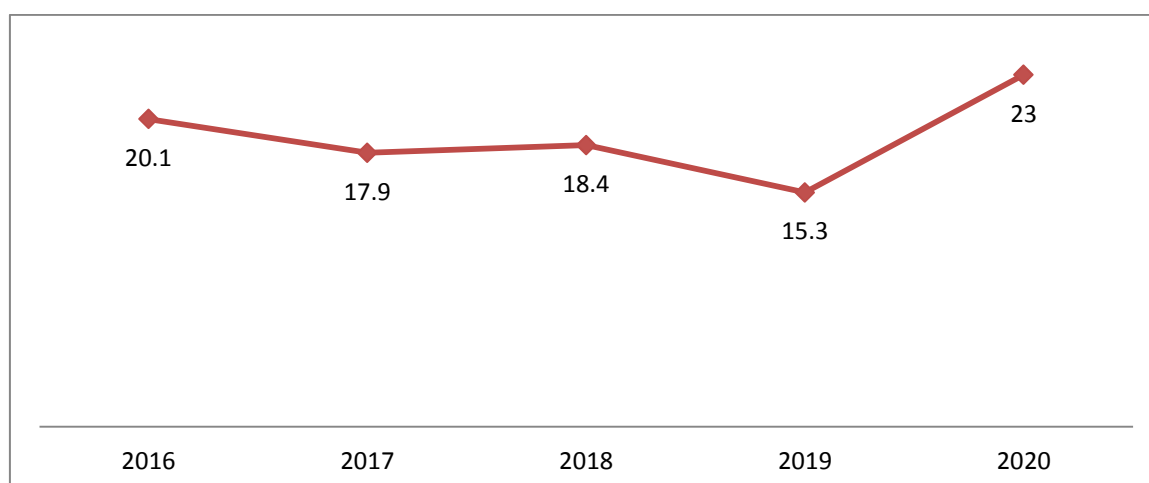
3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 TPB/SDGs berupaya untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 9 indikator. Salah satu target tersebut ialah Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

Grafik 2.1 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita (Gizi Kurang) Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021



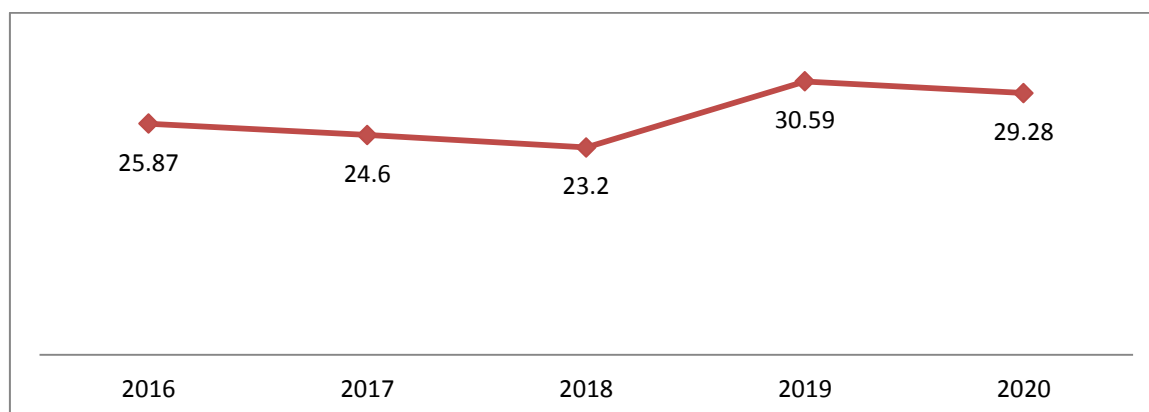


Prevalensi stunting di Sulawesi Selatan pada anak Balita masih cukup tinggi, walaupun terjadi fluktuatif selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020 proporsi stunting pada anak balita adalah sebesar 23% meningkat dari angka 15.3% di tahun 2019. Salah satu penyebab peningkatan ini ialah terjadinya gangguan pada pemenuhan gizi karena terbatasnya akses dan distribusi pangan dan protein hewani akibat Dampak Pandemi *COVID-19*. Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 12,19 persen pada tahun 2019 telah tercapai

Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Grafik 2.2 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, E-PPGBM, SSGBI, 2021

Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dari tahun 2016 sampai 2020, cenderung mengalami penurunan mencapai 29,28 persen pada tahun 2020, dan cakupannya pun mencapai 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor diantaranya meningkatnya surveilans gizi di 24 kab/kota sehingga kasus-kasus yang terjadi semuanya dapat ditemukan dan dilakukan intervensi penatalaksanaan kasus gizi buruk. Selain itu tersedianya aplikasi *by name by adres* Pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) sehingga data antropometri balita dan status gizinya tercatat dengan baik (saat ini hasil *coverage* pencatatan mencapai >85 % balita di Sulsel).





Arah Kebijakan

Arah kebijakan pilar sosial dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs Menghilangkan Kelaparan, yakni:

1. Perbaikan pelayanan kesehatan kesehatan sesuai SPM khususnya perbaikan 1000 hari pertama kehidupan serta upaya preventif penanganan kesehatan;
2. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan;
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura;
4. Peningkatan Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan;
5. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
6. Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama;
7. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
8. Pengembangan BPP sebagai Sentra Informasi Pertanian;
9. Pembinaan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani.

Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama (Beras, jagung dan kedelai).
2. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
3. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
4. Belum terwujudnya sistem logistik daerah yang terintegrasi dan informatif.
5. Pola konsumsi pangan yang belum berimbang, khususnya untuk kelompok umbi-umbian; pangan hewani; sayur dan buah; serta minyak dan lemak.





TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA



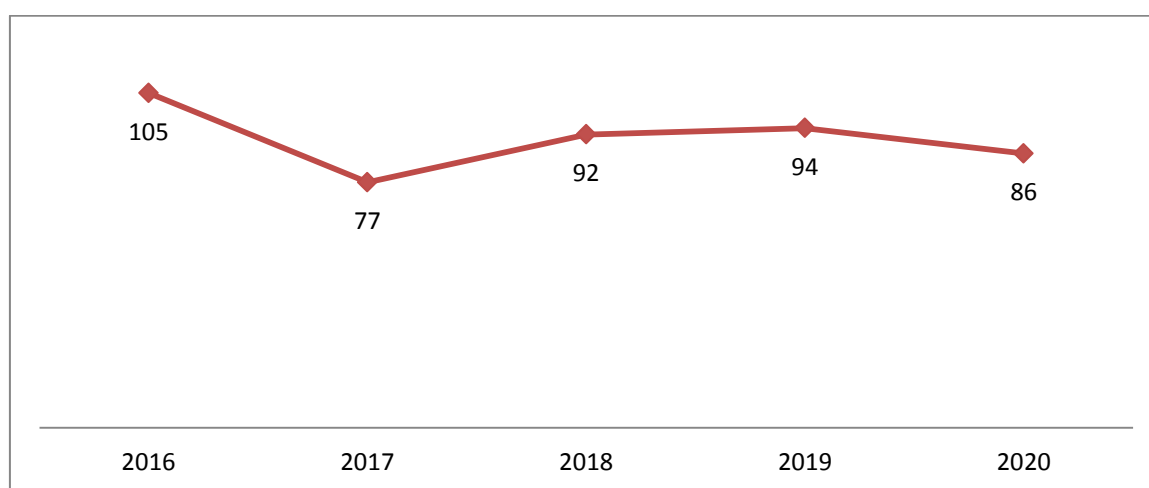
3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan ini berbicara tentang bagaimana masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur. Penyediaan air bersih dan sanitasi sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar. Salah satu upaya kunci untuk mencapai Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah mengurangi Angka Kematian Ibu dan Angka kematian Bayi.

Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator 3.1.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 3.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibudisebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan



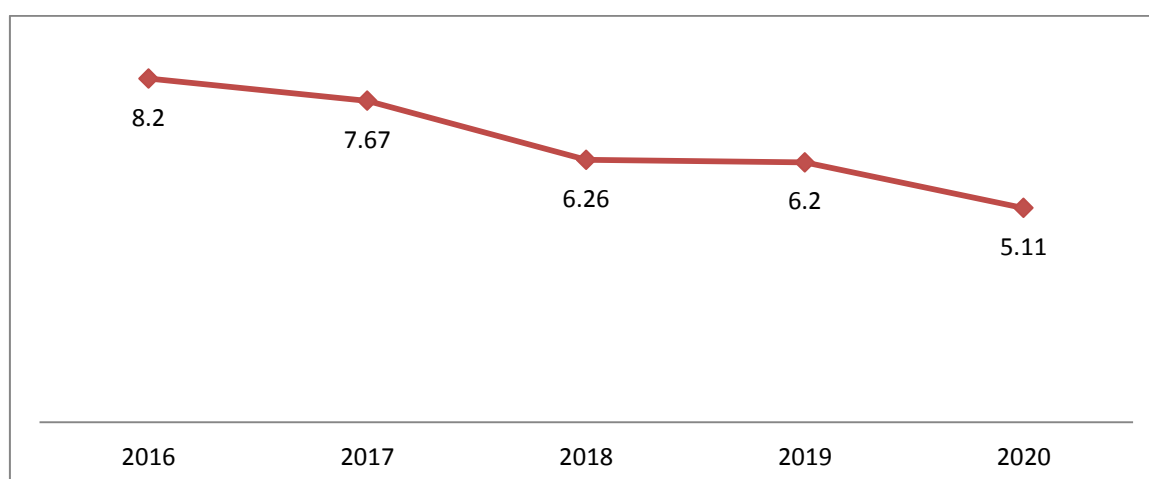


kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. Kasus kematian ibu pada tahun 2020 sebesar 86 Kasus menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 94 Kasus. Hal ini disebabkan Proporsi perempuan yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat pada tahun 2020

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Indikator 3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.2 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

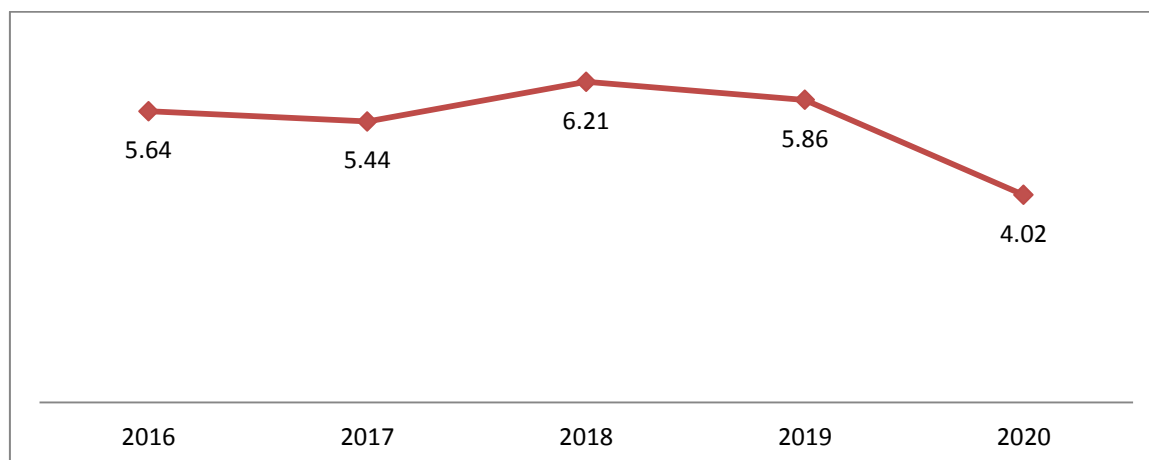
Sepanjang tahun 2016-2020, angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup cenderung mengalami penurunan, Rata-rata kematian Balita disebabkan oleh Diare dan Pneumonia, penyebab ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada saat anak sakit. Ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor risiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit yang belum adekuat.





Indikator 3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.3 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Sulawesi Selatan., 2016-2020

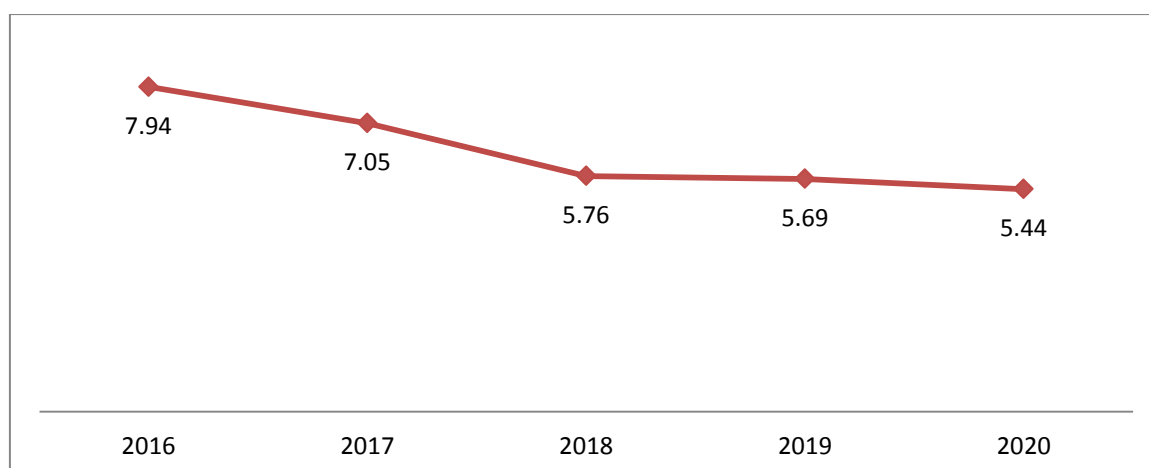


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Sepanjang tahun 2018-2020, angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup cenderung mengalami penurunan, Kematian Neonatal umumnya disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia, hal ini berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tatalaksana awal bayi beresiko serta dukungan sarana prasarana dalam penanganan bayi baru lahir bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yang mempengaruhi kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan ibu hamil ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya.

Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021





Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas) Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan

Sepanjang tahun 2015-2019, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami penurunan, Hal ini dikarenakan adanya beberapa perbaikan, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu semasa hamil serta penanganan dan pemantauan bayi baru lahir secara adekuat, dengan adanya program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan penyebab terbanyak kematian dimasa neonatal, yaitu BBLR dan Asfiksia, sementara pada masa bayi penyebab kematiannya adalah Pneumonia dan Diare, hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Arah Kebijakan

Strategi pembangunan Sulawesi Selatan yang mendukung pencapaian target Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera adalah “Meningkatkan keterpenuhan sarana prasarana pelayanan Kesehatan berbasis regional secara beriringan dengan upaya preventif dalam penanganan kesehatan “. Arah kebijakan dari strategi tersebut, yaitu Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat serta Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana/Kedaruratan di Sulawesi Selatan, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan, Penyediaan dan Peningkatan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dasar dan kefarmasian.





Tantangan Pelaksanaan dan permasalahan dari TPB ini adalah :

1. Masih rendahnya rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk
2. Masih rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
3. Masih rendahnya cakupan Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani.
4. Rendahnya Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
5. Masih rendahnya Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
6. Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Bayi
7. Masih rendahnya Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
8. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Nifas
9. Masih rendahnya Cakupan Pelayanan Anak Balita
10. Masih rendahnya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin.
11. Penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional dan ambulance siaga;
12. Kurangnya sarana prasarana dan tenaga kesehatan, khususnya pada daerah terisolir dan pulau-pulau kecil;
13. Masih kurangnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama kepada ibu, anak, remaja dan lansia;
14. Masih tingginya prevalensi angka stunting





TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS



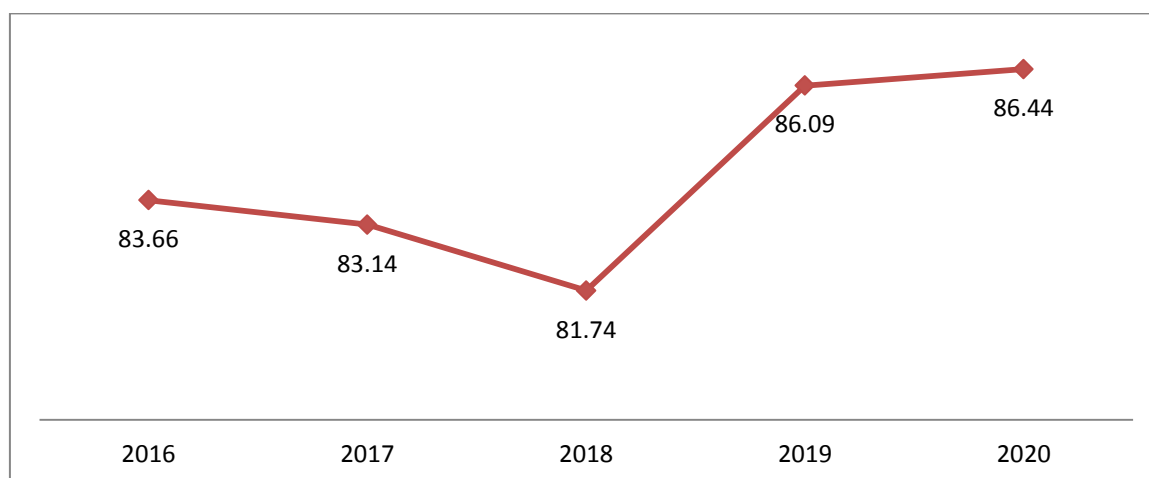
3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Tujuan 4 TPB/SDGs berupaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030.

Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Indikator 4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Grafik 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16 hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2020 Target APK dalam RAD RPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan adalah 82,78 persen dan Capaian (APK)



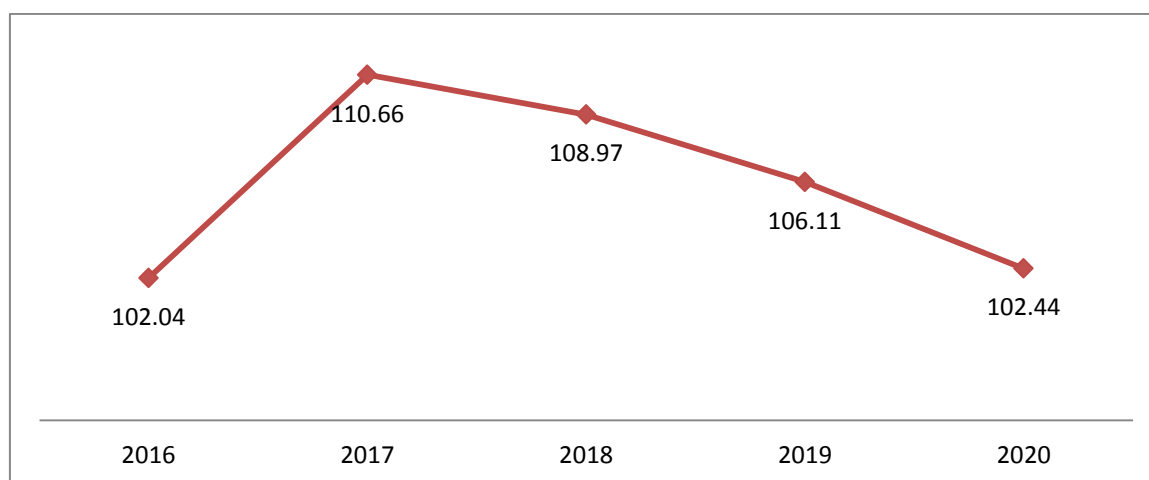


Sekolah Menengah yaitu 86,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indikator ini tercapai

Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Indikator 4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi

Grafik 4.2 Rasio Angka Partisipasi Manusia SMA/SMK/MA/ sederajat Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Angka partisipasi murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, sebab pengukuran APM menggunakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan data di atas, Capaian APM mengalami penurunan tiap tahunnya dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2020 Target Rasio APM adalah 84,5 dengan capaian 102.44 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasio APM di Sulawesi Selatan telah tercapai.





Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan berkualitas adalah Perluasan Akses Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu, Perbaikan fasilitas pembelajaran pendidikan menengah dan khusus, Peningkatan Mutu Pendidik / Tenaga Kependidikan yang Inovatif dan kreatif Penyediaan Bantuan Berupa Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Miskin serta Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi sumber daya manusia

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan program-program yang terencana dengan baik. Program yang direncanakan dan diimplementasikan oleh OPD mencakup:

1. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pembinaan Perpustakaan

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan pada tujuan ini :

1. Peningkatan kualitas pendidikan masih perlu dioptimalkan
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM),
3. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun,
4. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
5. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
6. Kurangnya penguatan sekolah yang menerapkan kurikulum lokal penambahan waktu pelajaran agama,
7. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
8. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan daerah terpencil.





TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



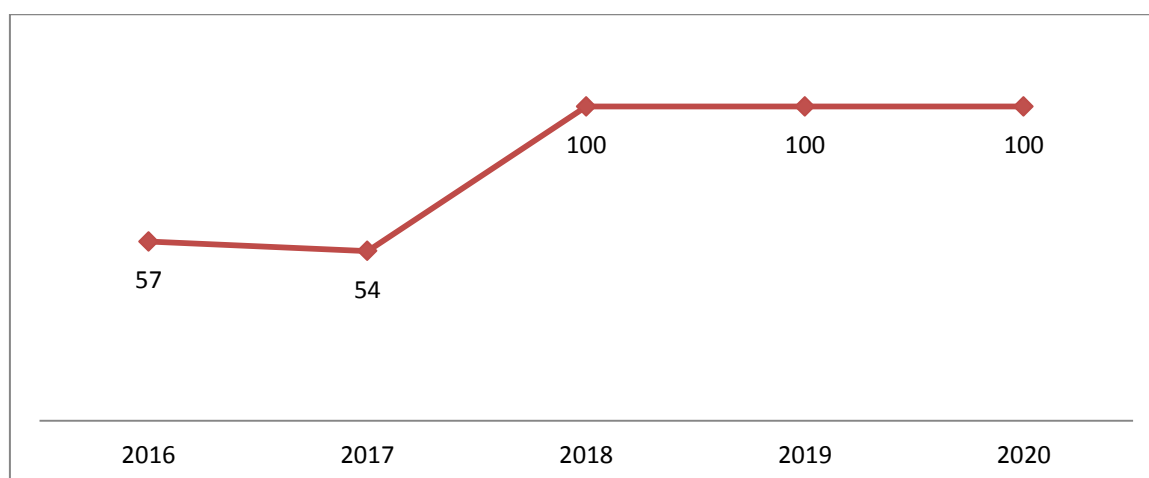
3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 13 indikator.

Target 5.2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya

Indikator 5.2.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Grafik 5.1 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mengamanatkan perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan amanat tersebut dengan capaian sebesar 100 persen sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan terus berkomitmen untuk memenuhinya. Selain layanan kesehatan





dan rehabilitasi sosial, perempuan dan anak korban kekerasan juga berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum berupa penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat mulai dari proses penyidikan pada unit perlindungan anak dan perempuan di Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Kota Besar sampai dengan putusan pengadilan yang didamping oleh oleh petugas dari Pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan capaian tersebut, maka Target RAD TPB/SDGs Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan persentase penduduk miskin yaitu 88 persen pada tahun 2020 telah tercapai.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar social, dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yakni dengan adanya Optimalisasi pelaksanaan regulasi dan perumusan kebijakan maupun pengawasan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan lintas sector, Akselerasi penguatan pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah serta perluasan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, DU dan Media termasuk lembaga Profesi, Akselerasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan penyediaan kader / fasilitator layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik dan hukum yang terstandar, Meningkatkan keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social politik dan hukum melalui pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender pilot project di kab/kota, Akselerasi perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan, Optimalisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan termasuk layanan rujukan , dan meningkatkan kapasitas SDM petugas layanan maupun penyediaan sarpras layanan perlindungan perempuan sesuai standar, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan maupun intensitas KIE lembaga layanan korban kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO yang memiliki standar layanan pada tingkat provinsi dan kab/kota, akselerasi Perumusan Kebijakan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan ketahanan dan kualitas keluarga, Akselerasi pengembangan dan penguatan lembaga penyedia layanan, serta meningkatkan kapasitas petugas lembaga layanan ketahanan dan kualitas keluarga di provinsi dan kab/kota, Meningkatkan jaringan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga yang ada di daerah, Terwujudnya pelaksanaan indicator-indikator ketahanan dan keluarga,





Akselerasi Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah , DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Akselerasi Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan system data gender dan anak di daerah, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi, Peningkatan pengelolaan data dan informasi ktP/ktA dan data terpilah berbasis system website ditingkat provinsi dan kab/kota, dan Optimalisasi pembinaan Kab/Kota dalam penyediaan system informasi gender dan anak dan SIMFONI PPA di Provinsi





TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



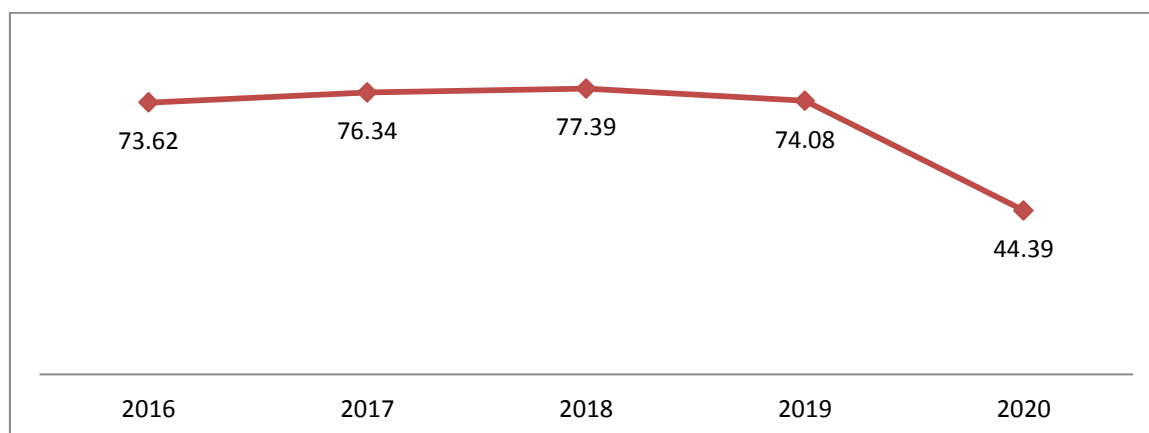
3.6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Indikator 6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

Grafik 6.1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Selama tahun 2016-2020, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak berfluktuasi setiap tahunnya, yaitu dari 74,08 persen pada tahun 2019 turun menjadi 44,39 persen pada tahun 2020.

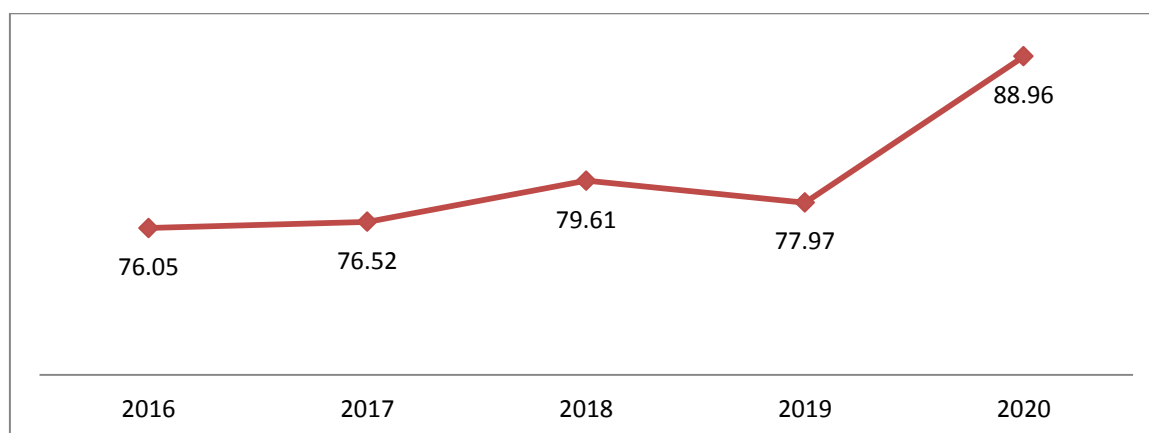




Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

Indikator 6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Grafik 6.2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Selama tahun 2016 hingga 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan mencapai 88.96 persen dibanding capaian pada tahun 2019 yaitu 77,97 persen.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Air Bersih dan Sanitasi adalah Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Minum Curah Lintas Kab/Kota, Pemenuhan kualitas dan kuantitas Air Limbah Domestik Regional, Peningkatan koordinasi pengelolaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air, Peningkatan Sarana Sumber Air Bersih dari Sumur Bor, Penguatan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran air minum dan sanitasi, Memfasilitasi penyediaan sistem penyediaan air minum di kawasan pesisir dan kepulauan serta daerah rawan air, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, Pembangunan infrastruktur sumberdaya air





TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



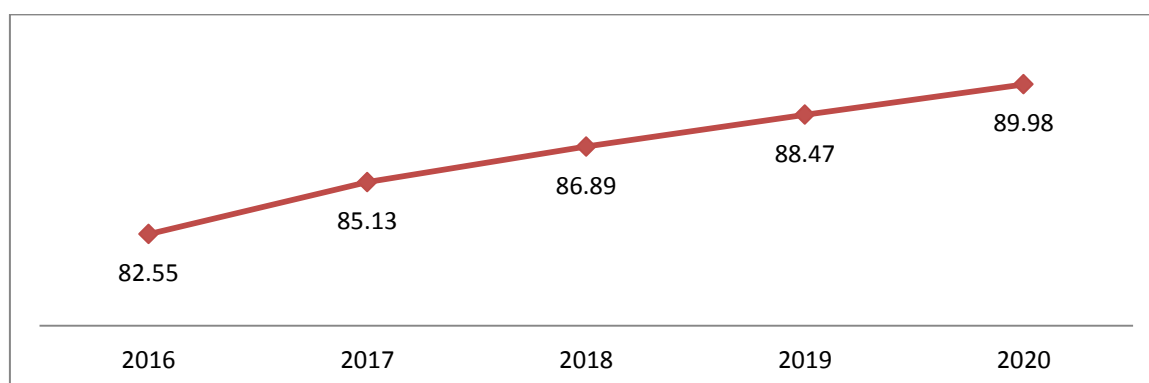
3.7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat.

Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Indikator 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Grafik 7.1 Rasio penggunaan gas rumah tangga, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Angka Rasio penggunaan gas rumah tangga digunakan untuk melihat proporsi rumah tangga yang sudah memanfaatkan penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih dan aman. Rasio penggunaan gas rumah tangga Sulawesi Selatan terus meningkat lima tahun terakhir. Tahun 2016 rasio penggunaan gas rumah tangga sebesar 82,55 persen kemudian menjadi 89,98





persen di tahun 2020. Target di dalam RAD TPB/SDGs adalah 90 persen sehingga untuk capaian rasio pengguna gas rumah tangga membaik (akan tercapai)

Arah Kebijakan

Ketersediaan energi merupakan salah satu pendukung utama peningkatan daya saing perekonomian. Prioritas pemerintah dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi adalah Peningkatan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dikhususkan bagi para kontraktor dan penambang yang tidak patuh pada aturan yang berlaku, Peningkatan pelayanan perizinan bagi penambang skala menengah dan skala kecil, Peningkatan kualitas pelayanan pengujian bagi usaha mineral, para pengguna air tanah dan masyarakat umum, Penyediaan Sarana dan Prasarana Energi, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan masyarakat terutama dalam produksi energi baru terbarukan, Peningkatan pengelolaan konservasi energi dan ketenagalistrikan Arah kebijakan pencapaian tujuan ini yaitu pembangunan infrastruktur energi terbarukan, penyediaan energi listrik yang semakin luas dan merata ke seluruh wilayah.



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



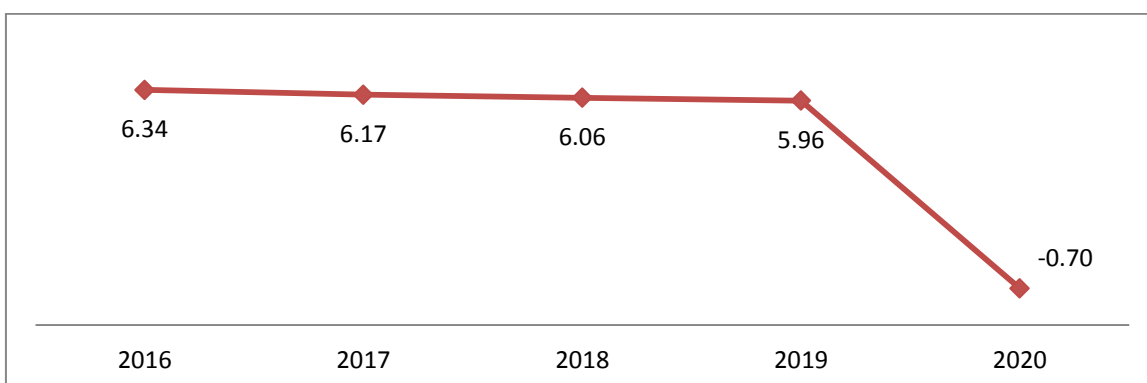
3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (inclusive growth) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (green growth). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.

Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Indikator 8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita

Grafik 8.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

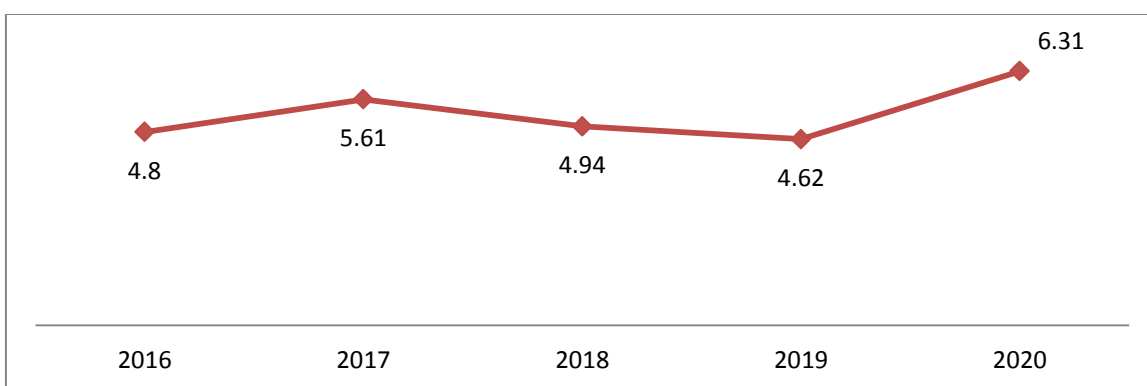


Penurunan pada capaian Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 mengalami kontraksi yang mencapai -0.70 persen dibanding dengan capaian 2019 yaitu 5.96 persen. Pertumbuhan yang minus tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan terutama pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan. Berdasarkan hal tersebut maka indikator Laju Pertumbuhan per Kapita tidak tercapai (memburuk)

Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Indikator 8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Grafik 8.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 juga terkena dampak dari Pandemi COVID-19 karena banyaknya penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 yang mencapai 6.31 meningkat 1.69 persen dari tahun 2019 yang mencapai 4.62 persen. Walaupun begitu, berdasarkan capaian dari target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam RAD TPB/SDGs yang sebesar 8,18 persen menunjukkan bahwa indikator ini tercapai

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu:





1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui Pemenuhan sarana prasarana dasar di permukiman transmigrasi serta pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigrasi;
2. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing,
3. Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif;
4. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
5. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis, dinamis, bermartabat dan berkeadilan;
6. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
7. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru berbasis data akurat pada sumber- sumber pertumbuhan pada wilayah tersebut serta peletakan dasar infrastruktur pendukung pertumbuhan;
8. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru
9. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional
10. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
11. Pemantapan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru





TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR



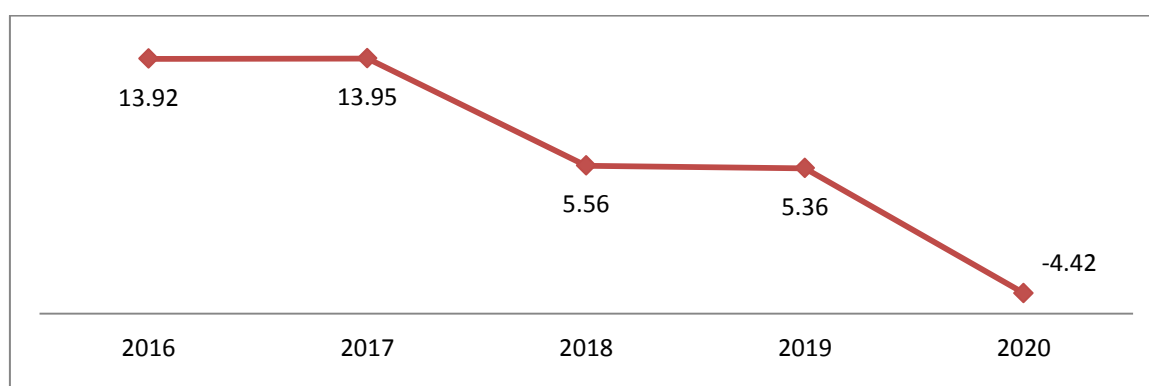
3.9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif yang Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Indikator 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Grafik 9.1 Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021



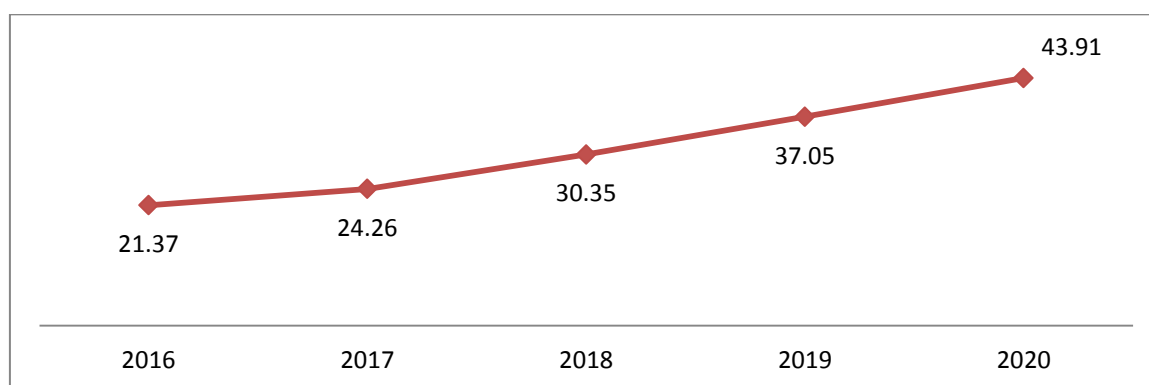


Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru

Target 9.c. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

Indikator 9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan internet

Grafik 9.2 Proporsi individu yang menggunakan internet, Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya proporsi individu yang memiliki telepon genggam maka proporsi individu yang menggunakan internet juga mengalami peningkatan di tahun 2016 hingga 2020 dengan capaian 43.91 persen.





Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah : Pembinaan pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa, Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana Transportasi, Peningkatan sarana dan prasana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Meningkatkan fasilitas, kapasitas dan pengendalian operasional di rest area.

Tantangan





TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN



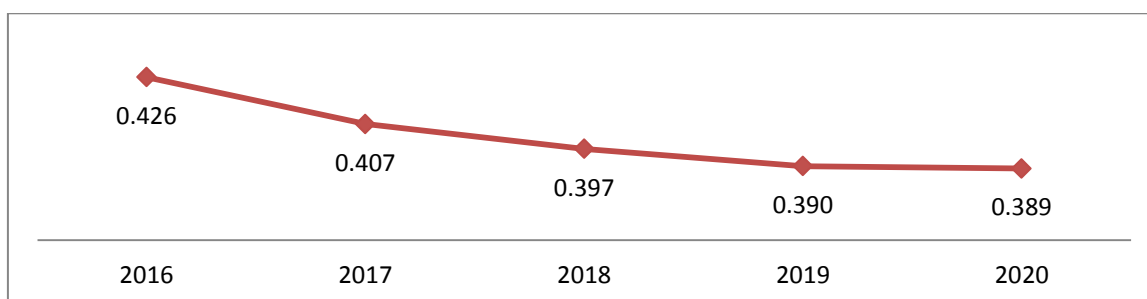
3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi global. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah di mana kebutuhannya paling besar. Memfasilitasi migrasi yang aman dan mobilitas orang juga menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan yang melebar.

Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indikator 10.1.1 Koefisien Gini

Grafik 10.1 Koefisien Gini Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Nilai koefisien gini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Nilai koefisien gini pada tahun 2020 sebesar 0,389 lebih rendah dibandingkan koefisien gini pada tahun 2019 sebesar 0,390. Nilai koefisien gini pada 2020 telah memenuhi target RAD TPB/SDGs Provinsi yaitu di bawah 0,36.





Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan secara keseluruhan diarahkan untuk menurunkan kesenjangan yang tergambar pada angka koefisien gini. Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan pada pencapaian target Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Arah Kebijakan pembangunan yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah :

1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
2. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perlindungan tenaga kerja di sektor informal;
3. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan;
4. Penguatan SDM pelaku usaha dan dukungan sarana prasarana, teknologi, dan micro finance pada wilayah pertumbuhan ekonomi baru;
5. Pengembangan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan destinasi unggulan berbasis wisata alam, budaya dan buatan dalam standar nasional dan internasional;
6. Penguatan kerjasama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
8. Pemantapan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tantangan dan Permasalahan pada tujuan 10 antara lain :

1. Tingkat produktivitas pendapatan masih rendah
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas manajemen usahatani.
3. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal.
4. Rendahnya tingkat inovasi dan penerapan teknologi telah mengakibatkan produktivitas lahan sangat terbatas peningkatannya atau bahkan cenderung turun pada beberapa komoditas.
5. Belum optimalnya terhadap pemberdayaan petani dirasakan turut mempengaruhi tingkat produktivitas petani.
6. Penempatan Industri pengolahan di daerah masih rendah karena pertimbangan jarak dengan pasar.





7. Belum optimalnya pemenuhan standarisasi kualitas produk industri kecil dan menengah;
8. Belum meratanya persebaran industri di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih banyak bertumpu pada kawasan perkotaan dibandingkan dengan pedesaan
9. Rendahnya kemampuan kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar.
10. Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam;
11. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang;
12. Terbatasnya pemberdayaan industri kecil dan menengah, khususnya melalui upaya penguatan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh, konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi;
13. Ketransmigrasian Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
14. Kurangnya kesiapan provinsi penempatan transmigran untuk menyediakan sarana dan prasarana pemukiman.





TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



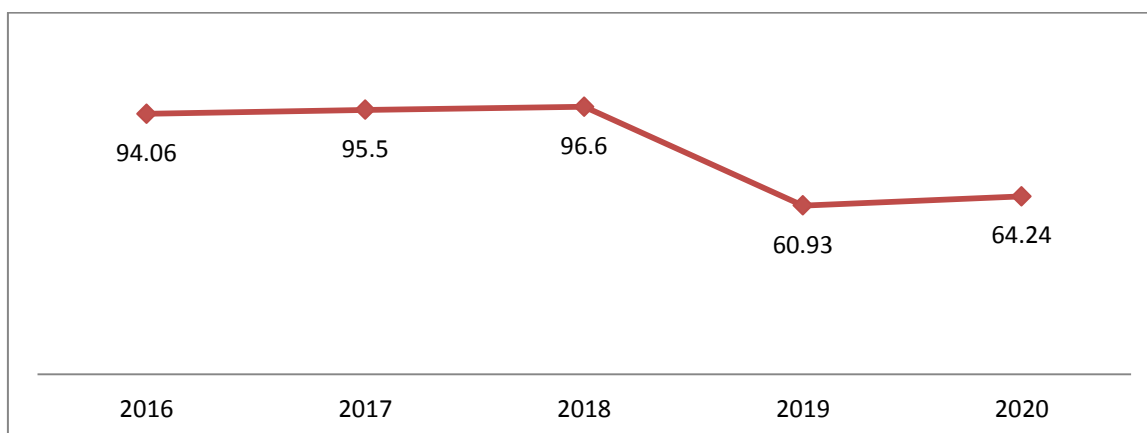
3.11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan.

Target 11.1. Pada Tahun 2030, Menjamin Akses Bagi Semua Terhadap Perumahan Yang Layak, Aman, Terjangkau, Termasuk Penataan Kawasan Kumuh, Serta Akses Terhadap Pelayanan Dasar Perkotaan

Indikator 11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Grafik 11.1 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021



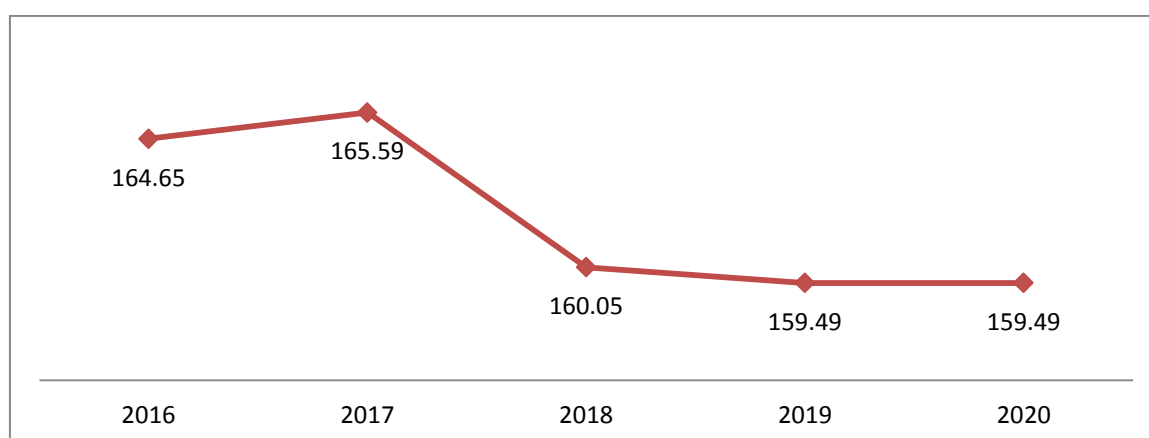


Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) Kriteria rumah layak huni , yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2020 besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan sebesar 64.24 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 60.39 pada tahun 2019. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa rasio rumah layak huni tercapai

Target 11.1. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Indikator 11.5.1(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Grafik 11.1 Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lintas penumpang, perdagangan dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Luas wilayah 45.764,53 Km²,





terdiri dari 24 kabupaten dan kota (BPS dalam angka Sulawesi Selatan, 2020). Wilayah di Sulawesi Selatan memiliki kondisi geografis yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang kurang baik. Secara umum faktor geologi dan kegempaan, wilayah Sulsel dilalui oleh Sesar Walanae melintang dari barat laut menuju tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki beragam ancaman bencana seperti Gempa, banjir, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks Risiko Bencana Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai angka 169.49 dengan status Risiko Bencana Tinggi.

Arah Kebijakan

Kota dan permukiman yang berkelanjutan yang merupakan tujuan 11 dari TPB yang menargetkan pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana. Target pembangunan ini sesuai dengan kebijakan prioritas Pemerintah Sulawesi Selatan yang sarannya adalah meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota. Tujuan pembangunan ini juga menargetkan pengurangan kawasan kumuh dengan menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman dan terjangkau yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas jasa konsultasi dan produk perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman, Memfasilitasi penyediaan prototipe rumah instan sederhana sehat dan penunjangnya untuk mengantisipasi bencana skala provinsi serta relokasi program pemerintah provinsi, Memfasilitasi penanganan kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan Menyebarkan informasi kebencanaan hingga lapisan masyarakat paling bawah (keluarga).

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Kota dan Permukiman Berkelanjutan

1. Timbulan gas rumah kaca sektor limbah domestik dan persampahan.
2. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata
3. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi
4. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan
5. Belum optimalnya Sistem Data dan Informasi perumahan dan Kawasan permukiman.
6. Belum terpenuhinya air minum dan sanitasi layak





TUJUAN 12 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN



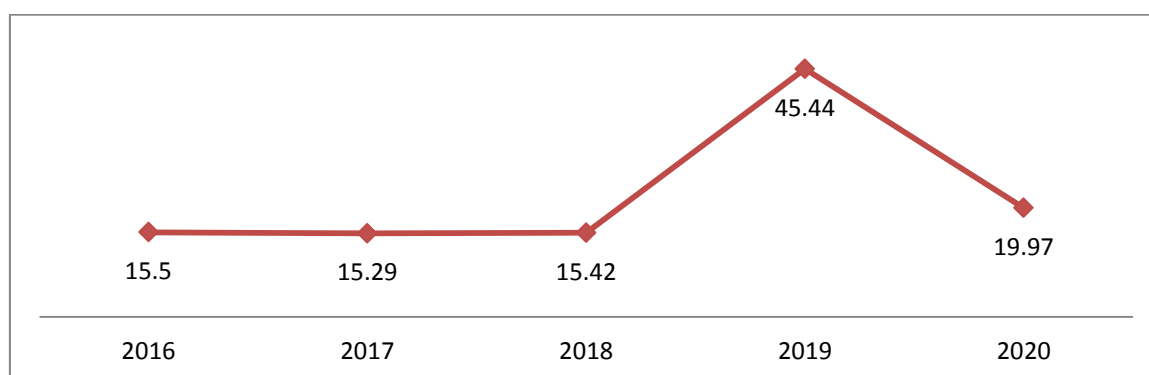
3.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan "simbol" di mana image atau citra menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia informasi dan komunikasi. Permasalahan Lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan.

Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali

Indikator 12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

Grafik 12.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup





sertabudaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Jumlah timbunan sampah yang di daur ulang mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu 19.97 Ton/Hari dibandingkan pengelolaan sampah daur ulang pada tahun 2019 yang mencapai 45.44 Ton/Hari. Hal menunjukkan pada tahun 2020 tidak tercapai berdasarkan target RAD TPB/SDGs Provinsi yaitu di yaitu 45.44 ton/Hari

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon;
2. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
4. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
5. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;
6. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan terhadap Pencapaian Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan :

1. Kemampuan penanganan sampah khususnya upaya mengurangi sampah dan limbah di Sulawesi Selatan masih terbatas.
2. Belum ada rekomendasi dari pemerintah setempat untuk penunjukan lokasi
TPA
Regional





TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM



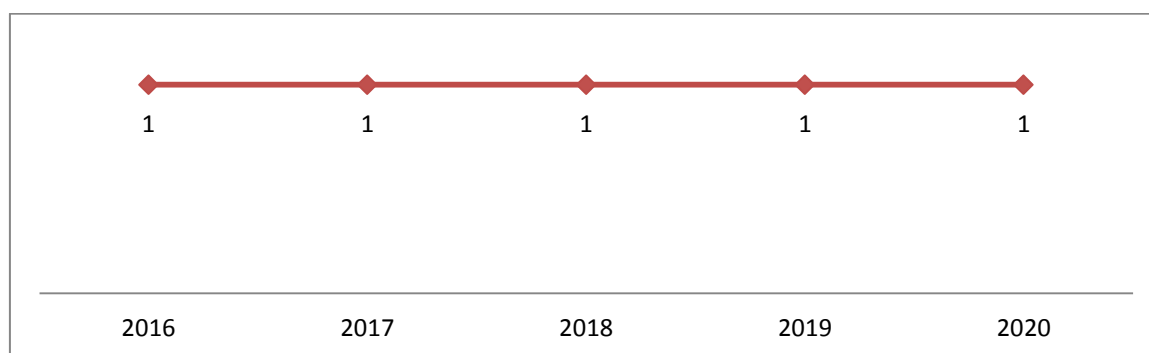
3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan "simbol" di mana image atau citra menjadi sangat penting. Hal ini seiring dengan semakin pesatnya kemajuan dunia informasi dan komunikasi. Permasalahan Lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan.

Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Grafik 13.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik , 2021

Berdasarkan karakteristik wilayah Sulawesi Selatan, sejumlah risiko bencana yang dapat terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan antara lain; banjir, banjir bandang, longsor, tsunami, cuaca ekstrim, gempa, kebakaran dan kekeringan. Bencana yang paling berdampak pada wilayah Sulawesi Selatan adalah cuaca ekstrim dan tanah



longsor selain bencana banjir dan gempa. Data kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Maka dari itu setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka mengantisipasi dan memperhitungkan kemungkinan ancaman bencana dan kerugian ekonomi yang disebabkan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan lingkungan dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan penanganan perubahan iklim, yaitu:

1. Penerapan secara efektif RPPLH dan KLHS dalam mengadaptasi dan memitigasi dampak lingkungan dari perubahan yang berlangsung serta koordinasi antar sector dalam implementasi pembangunan rendah karbon;
2. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam pemeliharaan keanekaragaman hayati dan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
4. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan antar tingkatan pemerintahan dalam penegakan hukum terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan ketaatan pelaksanaan pembangunan rendah karbon;
5. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon;
6. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana :

1. Masih rendahnya sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi
2. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah
3. Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Sulawesi Selatan



TUJUAN 14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT



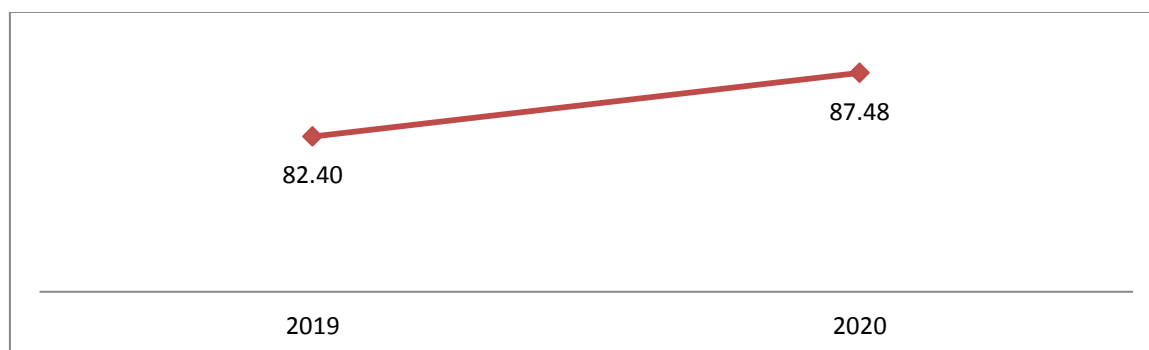
3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan..

Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

Indikator 14.6.1 (a) Persentase kepatuhan pelaku usaha

Grafik 14.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha Provinsi Sulawesi Selatan, 2019-2020



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan , 2021



Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah banyaknya orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan dan kelautan dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan. Berdasarkan capaian pada tahun 2020 Persentase kepatuhan pelaku usaha adalah 87.48 persen meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 82.40 persen.

Arah kebijakan

Tujuan Ekosistem Lautan menargetkan pelestarian wilayah pesisir dan laut serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan melalui Akselerasi peningkatan daya saing dan nilai tambah produk melalui kemitraan usaha, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perikanan yang berkelanjutan, Pengembangan usaha pengolahan perikanan, Menjaga Ketersediaan stock ikan, Penataan dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Pelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan.

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam Penanganan Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan :

1. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam.
2. Masih rendahnya penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
3. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan.
4. Masih kurangnya ketaatan dan upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta penyusunan rencana rinci yang diamanatkan oleh RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan upaya pembinaan kepada petani untuk menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
6. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.





TUJUAN 15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT



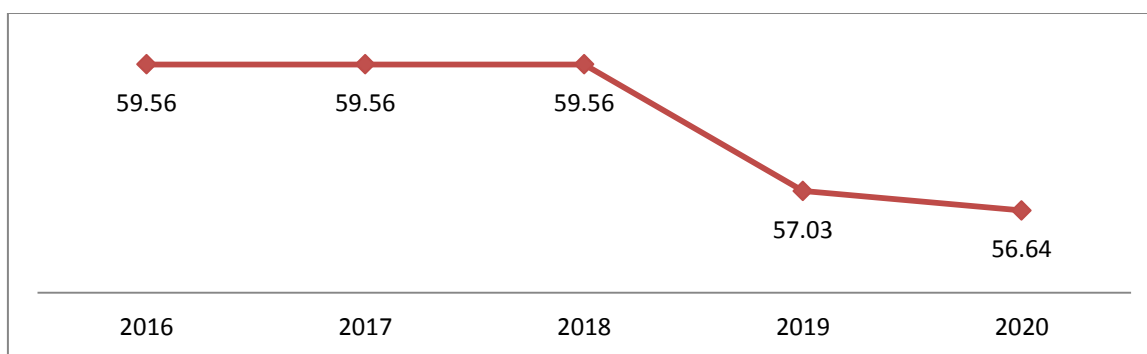
3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 bertujuan untuk melindungi tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati.

Target 15.1. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator 15.2.1 (a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Grafik 15.1 Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021

Kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terjadi perubahan rasio luas kawasan tutupan hutan terhadap total luas kawasan hutan menjadi sebesar 75,67% berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 91.337 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 84.032 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 1.838 Ha. Dengan demikian luas kawasan hutan menjadi 2.610.060





Ha terdiri dari luas kawasan hutan lindung seluas 1.144.899 Ha, luas hutan produksi seluas 144.267 Ha, luas hutan produksi terbatas seluas 476.019 Ha, luas hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 14.844 Ha, luas kawasan konservasi seluas 830.030 Ha. Karena luas kawasan hutan dan luas kawasan lindung ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan, maka rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan adalah tetap selama keputusan penetapan kawasan hutan tidak berubah. Namun demikian pada kenyataannya masih terdapat banyak lokasi kawasan yang masih mendapat klaim kepemilikan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik kepemilikan kawasan hutan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung Ekosistem Daratan khususnya ekosistem hutan adalah : percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat yang akan memberikan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan di Sulawesi Selatan agar dapat lestari dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan ini juga sesuai dengan arah kebijakan prioritas yakni Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan lestari, Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, Mewujudkan upaya preventif dan persuasif dalam rangka pengamanan hutan melalui kegiatan patroli rutin dan penyuluhan dan Mewujudkan masyarakat serta pelaku industri yang peduli terhadap kelestarian hutan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan :

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Belum Optimalnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Menurunnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
6. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Sulawesi Selatan relatif rendah





7. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompentensi Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan
8. Belum selesainya penataan batas kawasan hutan, sehingga belum terwujud secara fisik dan belum terpenuhinya aspek yuridis kawasan hutan.
9. Perubahan/ alih fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, pertanian dan penambangan yang berimplikasi pada bertambahnya lahan kritis dan degradasi fungsi kawasan hutan.
10. Tingginya dinamika konflik penguasaan lahan di daerah akibat belum tersosialisasikannya secara baik rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan hingga pada tahap penetapan kawasan hutan dan kawasan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Belum maksimalnya pelayanan publik bidang keplanologian, antara lain disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia dan minimnya fasilitas penunjang kegiatan seperti pengambilan dan penyusunan data spasial bidang kehutanan.
12. Fasilitas berupa peralatan kegiatan inventarisasi hutan masih terbatas
13. Tidak seimbangnya kapasitas izin industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku kayu.
14. Belum tertibnya penatausahaan hasil hutan.
15. Pelayanan terhadap masyarakat masih terkesan berbelit, lamban dan mahal akibat personil belum ditunjang oleh profesionalisme dan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
16. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan
17. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
18. Data detail kondisi dan karakteristik DAS sebagai dasar perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan dan rencana pengelolaan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan tidak dapat mencapai sasaran secara tepat sesuai skala prioritas.
19. Kewenangan kegiatan RHL dan Pengelolaan DAS Provinsi Sulawesi Selatan berada di luar kawasan hutan, sementara kawasan hutan merupakan hulu dari kegiatan RHL.





20. Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
21. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulawesi Selatan
22. Tingkat sedimentasi sungai masih relatif tinggi, banyak dibutuhkan bangunan perangkap sedimen (gully plug, dam penahan dan Pengendali, rorak dan embung).
23. Tingkat erosi permukaan masih tinggi ditandai dengan tingginya laju aliran permukaan (run off), rendahnya penyerapan (infiltrasi) dan mempengaruhi jumlah kandungan air tanah
24. Konflik Tenurial yang masih berkepanjangan
25. Pengrusakan hutan oleh masyarakat karna alasan ekonomi, batas kawasan yang tidak jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan.
26. Rasio jumlah tenaga Pengamanan Hutan/ Polisi Kehutanan dibanding dengan luas





TUJUAN 16 PERDAMAIAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH



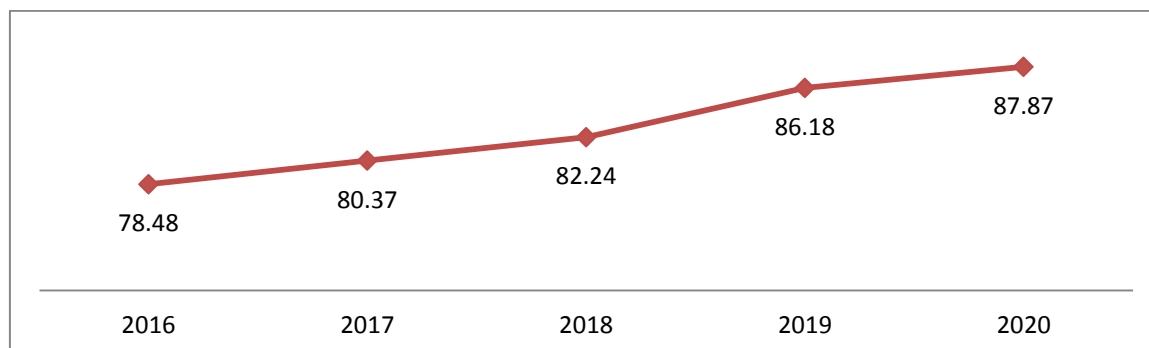
3.16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan negara. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target 15.1. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

Indikator 15.2.1 (a) Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran.

Grafik 15.1 Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran. Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021





Pencatatan kelahiran harus dilakukan untuk semua masyarakat, baik semua jenis kelamin maupun semua golongan pendapatan. Selama tahun 2016-2020, persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40 persen bawah yang memiliki akta kelahiran terus meningkat. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, indikator ini meningkat sebesar 9,39 poin persentase. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran. Tren ini juga memberikan optimisme dalam mencapainya target pemberian identitas yang sah bagi semua.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan 16 yakni Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dapat dilihat dari menurunnya angka kriminalitas dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan serta angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh diprioritaskan pada Akselerasi Perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di daerah, Peningkatan capaian KLA dngan melibatkan Lembaga Non Pemerintah, DU, Media Massa dan Forum Anak, Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyedia Layanan PUHA dan Perlindungan Khusus Anak yang terstandar, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem data gender dan anak serta sumberdaya pengelola data dan informasi

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.
2. Penegakan PERDA belum optimal
3. Perlunya peningkatan efektivitas penerapan strategi dan pemanfaatan media komunikasi public
4. Perlunya peningkatan sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang memadai
5. Perlunya peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah.
6. Perlunya peningkatan optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral;
7. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi;
8. Perlunya peningkatan upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sektoral.





TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



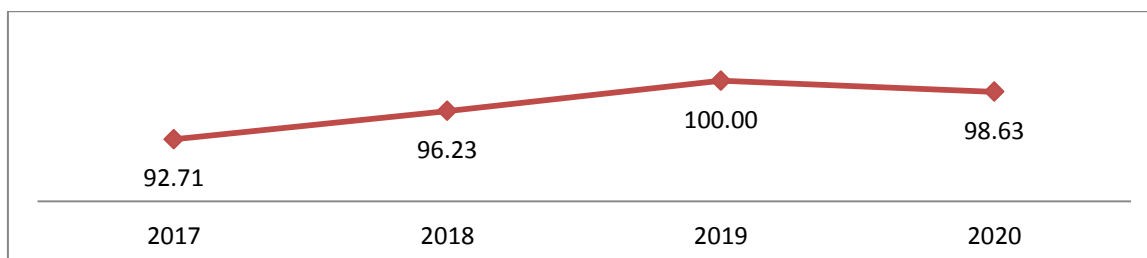
3.17. Memperkuat Saran Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen yang kuat pada kemitraan dan kerja sama di tingkat global. Pemenuhan target pembangunan harus dilakukan dengan meningkatkan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, PBB, dan pemeran aktor global lainnya. Kemitraan ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan negaranegara, khususnya negara-negara tertinggal. Pengembangan ini dilakukan salah satunya dengan mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang meningkatkan ekspor.

Target 17.1. Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Indikator 17.8.1(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

Grafik 18.1 Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Provinsi Sulawesi Selatan, 2016-2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021





Peningkatan ketersediaan data berkualitas tinggi dapat dilihat dari respon pengguna data statistik. Sebagai lembaga statistik nasional, BPS harus dapat menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Selama tahun 2017-2020, persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik terus mengalami peningkatan namun turun pada tahun 2020. pada tahun 2020, persentase kepuasan pengguna sudah mencapai 100

Arah kebijakan

Arah kebijakan pencapaian pilar pembangunan ekonomi dalam mewujudkan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan yakni dengan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan. Perkuatan mobilitas sumber daya domestik tergambar pada meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu target Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Selain itu penggunaan teknologi dan informasi merupakan salah satu sarana pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang indikator pentingnya antara lain adalah Rasio penerimaan pajak terhadap PDB serta Proporsi individu yang menggunakan internet.

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung pencapaian target tujuan 17 TPB/SDGs tersebut diprioritaskan pada Merwujudkan Ketersediaan dan Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah, Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK, Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi

Tantangan pelaksanaan dan permasalahan dalam :

1. Belum adanya layanan informasi on-line terkait potensi pengembangan Kawasan hutan dan hasil hutan bukan kayu sebagai pendorong optimalisasi kerjasama dengan pihak terkait.
2. Perlunya peningkatan optimalisasi peran/keterbukaan badan publik dalam penyediaan informasi





IV. PRAKTIK- PRAKTIK BAIK





4.1. Praktik Baik Pilar Sosial

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK di samping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun.

Upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting, membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Dalam mencapai keterpaduan/integrasi tersebut, diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor antara tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya keterpaduan tersebut, maka pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda kemudian merumuskan Delapan Program Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi yang wajib diterapkan oleh semua kabupaten/kota lokus.

Hingga saat ini, secara bertahap selama 2 tahun program ini telah dilakukan oleh 11 (sebelas) kabupaten prioritas di Provinsi Sulawesi Selatan yakni kabupaten Enrekang dan Bone yang ditetapkan sebagai prioritas stunting pada tahun 2019, Kabupaten Enrekang, Bone, Pinrang, Tana Toraja, Toraja Utara, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Selayar dan Pangkep ditetapkan pada tahun 2020.



Salah satu program yang mendukung Penurunan Angka Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan ialah Program **Gammara’na (Gerakan Masyarakat Mencegah Dan Memberantas Stunting)**. Program ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan Stunting Melalui Pendampingan Keluarga Khususnya Sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Gambar 4.1

Pelaksanaan Kegiatan Gammara’na di Provinsi Sulawesi Selatan



Berdasarkan hasil capaian data progres pelaksanaan Gammara’na, terdapat beberapa penurunan jumlah prevalensi stunting Baduta selama Program Pendampingan Gizi di Kab. Enrekang dari 22% menjadi 19,19% dan jumlah prevalensi Ibu hamil Kekurangan Energi Kronik dari 16,3% menjadi 12,6%. Untuk di Kabupaten Bone, Prevalensi Stunting pada Baduta selama program Pendampingan gizi dari 13,3% menjadi 9,3% dan Pervalensi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik dari 17,79% menjadi 17,3%.

4.2. Praktik Baik Pilar Ekonomi

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 9.1 Triliun dengan jumlah proyek 1.981 sedangkan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 3.3 Triliun dengan jumlah proyek 525 sehingga total realisasi investasi di Sulawesi Selatan sebesar 12.4 Triliun melampaui target Perencanaan sebesar 8 Triliun (156 %). Hal ini bisa tercapai karena adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan dalam rangka menciptakan perizinan satu pintu yang mempermudah untuk melakukan pengurusan perizinan. Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui revisi SOP, Optimalisasi pelayanan perizinan secara online, serta melakukan bimbingan ke pelaku usaha terkait tatacara pengisian LKPM Online.



Gambar 4.2

Komitmen Pelaksanaan Penyederhanaan Perizinan Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



4.3. Praktik Baik Pilar Lingkungan

Dalam rangka menyediakan air bersih di pesisir dan kepulauan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan program **ARSINUM (Air Siap Minum)** dengan menyediakan air bersih melalui pengadaan Alat Pengelolaan Air Siap Minum. Alat tersebut akan menyaring dan memproses air laut menjadi air yang dapat digunakan oleh masyarakat baik untuk konsumsi maupun untuk kegiatan rumah tangga. Teknologi ini sebagai solusi dari ketersediaan air bersih Masyarakat yang berada di pesisir dan kepulauan dimana sebelumnya masyarakat membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Gambar 4.3

Alat Pengelola Air Siap Minum di Provinsi Sulaawesi Selatan





Sumber: sulselprov.go.id

Pemerintah memberi perhatian khusus untuk masyarakat Sulawesi Selatan di daerah Pulau dan pesisir dengan mengupayakan ketersediaan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang lainnya. Pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan air siap minum pada 3 Lokasi yang berada di Kota Makassar yaitu Pulau Lanjukang, Pulau Laikang, dan Pulau Samalona. Pemerintah berencana untuk memasang pada 20 titik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.4. Praktik Baik Pilar Kelembagaan

Baruga Pelayanan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan (BARUGA SULSEL) adalah portal digital pelayanan dan pelaporan masyarakat berbasis web dan aplikasi. Program Baruga merupakan langkah pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Pelayanan ini dengan tagline "Cepat - Tepat - Tuntas" sehingga layanan ini dapat menjawab dengan cepat aduan masyarakat, dan melakukan tindakan dari laporan dengan tepat tuntas. Gubernur sendiri menyambut secara positif. Dengan meluncurnya Baruga versi 2.0 diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi terkait pelayanan dan kegiatan publik beserta melaporkan permasalahan terkait pelayanan publik yang dialaminya. Tidak mungkin Provinsi Sulawesi Selatan dapat Berjaya kembali tanpa ikut serta masyarakat publik. Segera diunduh, Baruga versi 2.0 sekarang tersedia di Apple Appstore dan Google Playstore.

Sebagai bangunan tradisional khas Sulawesi Selatan yang biasanya menjadi tempat kumpul – kumpul atau diskusi masyarakat, merupakan nama yang paling tepat untuk portal digital pelayanan dan pelaporan yang memfasilitasi aspirasi dan keluhan masyarakat. Besar harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk BARUGA SULSEL agar menjadi tempat berkumpul digital bagi masyarakat untuk berdiskusi terkait informasi dan kegiatan publik sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. BARUGA SULSEL juga menyediakan layanan pelaporan untuk masyarakat memberikan masukan dan keluhan terkait layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mungkin masih kurang dan bisa diperbaiki.

Gambar 4.4.



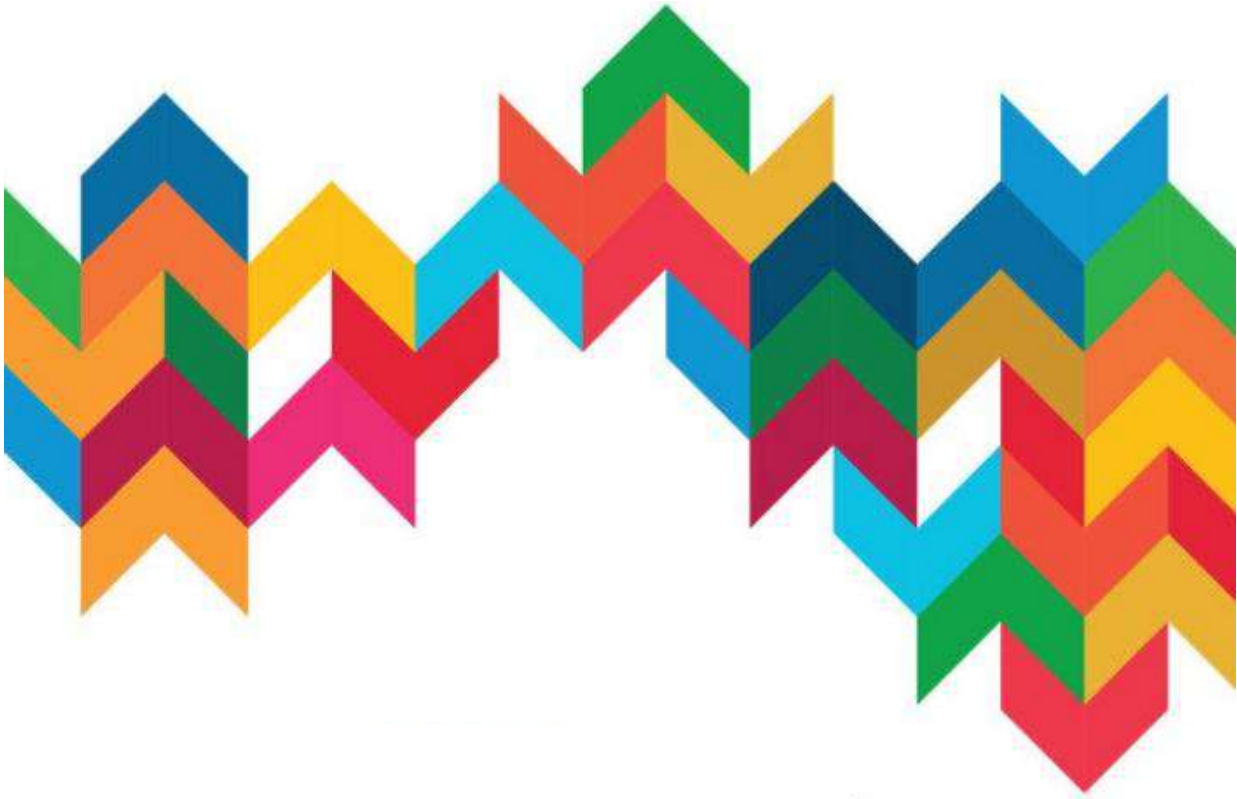


Logo Baruga Sulsel 2.0



Aplikasi BARUGA SULSEL versi 1.0 pertama dibuat dan diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan motto “Cepat, Tepat dan Tuntas”. Aplikasi merupakan inovasi dan gebrakan program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. Dalam bulan pertama Aplikasi tersebut diluncurkan, lebih dari 300 laporan masyarakat telah diterima oleh admin dan sampai sekarang terus meningkat. Admin BARUGA SULSEL bertanggung jawab untuk meneruskan dan memastikan status dan selesainya setiap laporan yang masuk ke setiap Organisasi Perangkat Daerah. Seiring berjalannya program ini, banyak masukan dari masyarakat untuk memperluas cakup BARUGA SULSEL, maka dari itu diluncurkanlah BARUGA SULSEL versi 2.0.





V. KESIMPULAN





5.1. Kesimpulan

Dalam kondisi Krisis Kesehatan saat ini yang melanda Indonesia serta Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat luas khususnya terhadap pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan TPB/SDGs melalui berbagai program dan kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis dalam kondisi Pandemi Covid. Sejumlah langkah yang telah ditempuh daerah sampai dengan akhir tahun 2020 antara lain: (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah secara *online*, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator TPB/SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB/SDGs, (iv) membuat peraturan tentang penanggungjawab kelompok kerja berupa SK. Gubernur terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi TPB/SDGs di Sulawesi Selatan.

Pada tujuan 1 tanpa kemiskinan, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan selama masa pandemi dari sebesar 8,56% pada September 2019 meningkat menjadi 8,72% pada September 2020. Pada tujuan 2 Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita tercatat memburuk dari 15,3% (2019) meningkat menjadi 20,3% (2020). Pada tujuan 3 kehidupan sehat dan sejahtera, Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi dari 96,15 persen pada tahun 2019 menurun menjadi 73,82 persen pada tahun 2020. Pada tujuan 4 pendidikan berkualitas, rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 8,86 tahun pada tahun 2020, meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,73 tahun. Pada tujuan 5 kesetaraan gender, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2020 telah mencapai 100%. Pada Tujuan 6 air bersih dan sanitasi layak, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada tahun 2020 mencapai 88,71% meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 85,34%.

Pada Tujuan 7 energi bersih dan terjangkau, bauran energi baru terbarukan tercatat dalam tren positif dari 14,73% pada tahun 2019 meningkat menjadi 20,74% pada tahun 2020. Pada Tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan berupa terkontraksinya pertumbuhan ekonomi





sebesar -1,55% pada tahun 2020. Pada Tujuan 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, juga menghadapi tekanan akibat pandemi tercermin dari pertumbuhan negatif sektor industri manufaktur sebesar -4,42% pada tahun 2020. Pada Tujuan 10 berkurangnya kesenjangan, capian gini ratio dari 0,391 per September 2019 menjadi 0,382 per September 2020.

Pada Tujuan 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan mengalami peningkatan persentase pengguna moda transportasi umum dari 23,30% (2019) menjadi 66,45% (2020). Pada Tujuan 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab menunjukkan penurunan terlihat dari jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dari 45,44 ton/hari (2019) menjadi 19,97 ton/hari (2020). Pada Tujuan 13 penanganan perubahan iklim dilakukan dengan pelaksanaan aksi yang termuat dalam 1 dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tujuan 14 ekosistem lautan, Persentase kepatuhan pelaku usaha pada tahun 2020 mencapai 87,48 melebihi target tahun 2020 sebesar 86,88 persen. Pada Tujuan 15 ekosistem daratan Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada tahun 2020 menjadi 12.000 Ha sesuai dengan target tahun 2020 yaitu 12.000 Ha.

Pada Tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat menunjukkan pencapaian seperti Persentase anak berumur 0-17 tahun dengan pendapatan 40% bawah yang memiliki akta kelahiran sebesar 87,87%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 86,18%. Pada Tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan terwujud dengan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik yang meningkat dari 39,09 persen pada tahun 2019 menjadi 43,98 persen pada tahun 2020.

